

ORIENTASI
Pustaka Filsafat dan Teologi
Th. XVIII, 1986



**YESUS
KRISTUS
PUSAT
TEOLOGI**

Editor: Tom Jacobs, S.J.

ORIENTASI
Pustaka.Filsafat dan Teologi
Th. XVIII, 1986

YESUS KRISTUS PUSAT TEOLOGI

Editor: Tom Jacobs, S.J.



PENERBIT KANISIUS

Yesus Kristus Pusat Teologi

27179

© Penerbit Kanisius

PENERBIT KANISIUS

Jl. P. Senopati 24, Telepon (0274) 2309, Teleks 25143

Yogyakarta 55121

Orientasi

Pustaka Filsafat dan Teologi

Tahun XVIII, 1986

Redaksi

Tom Jacobs, SJ.

Emmy Tranggani (Skr.)

Alamat

Jl. Abubakar Ali 1

Tromol Pos 1, Telepon 2253

Yogyakarta 55224

Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | 5 |
| "Yang Kukehendaki ialah Belas Kasihan dan bukan Persembahan" <i>Wim van der Weiden, MSF.</i> | 9 |
| Mesias dalam Apokaliptik Abad Pertama <i>Martin Harun, OFM.</i> | 25 |
| Kristologi Yohanes dalam Terang Surat-suratnya <i>St. Darmawijaya, Pr.</i> | 45 |
| Demi Nama Yesus Kristus Orang Nazaret itu, Berjalanlah! (Kis 3:10) <i>I. Suharyo, Pr.</i> | 69 |
| Perjanjian Baru — Apakah Membina Akhlak Umat Kristen? <i>B. Kieser, SJ.</i> | 79 |
| Dasar Hidup Moral Kristiani — menurut Injil Matius — <i>Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF.</i> | 100 |
| Yesus Kristus dan Keterlibatan Sosial Gereja <i>J.B. Banawiratma, SJ.</i> | 114 |
| Ensiklik "Laborem Exercens" Karangan Paus Johannes Paulus II <i>Franz Magnis-Suseno, SJ.</i> | 128 |
| Kristologi dan Ekaristi <i>Tom Jacobs, SJ.</i> | 152 |
| Daftar Publikasi P. Cletus Groenen, OFM. | 182 |
| Biodata Penulis | 192 |

ENSIKLIK "LABOREM EXERCENS" KARANGAN PAUS JOHANNES PAULUS II

FRANZ MAGNIS-SUSENO, SJ.

Pengantar

Pada tanggal 14-9-1981 Paus Johannes Paulus II menerbitkan sebuah ensiklik baru yang mulai dengan kata-kata "*laborem exercens*". Ensiklik itu semula akan diumumkan pada tanggal 15 Mei, tepat 90 tahun sesudah Paus Leo XIII menerbitkan ensiklik "*Rerum Novarum*", tetapi percobaan pembunuhan atas Bapak Suci memaksa Beliau untuk menunda penyelesaian ensiklik baru itu.

Ensiklik "*Laborem Exercens*" langsung menarik perhatian para ahli. Dibaca sepintas saja ensiklik itu memperlihatkan bobotnya. Temanya ialah pekerjaan manusia. Dengan demikian "*Laborem Exercens*" merupakan ensiklik kelima tentang masalah sosial (sesudah *Rerum Novarum* 1891, *Quadragesimo Anno* 1931, *Mater et Magistra* 1961 dan *Populorum Progressio* 1967. *Laborem Exercens* dengan demikian merupakan salah satu yang terkemuka dalam deretan dokumen Gereja di zaman modern tentang masalah sosial manusia).

Karangan ini¹⁾ saya bagi dalam tiga bagian besar. Bagian pertama merupakan pendahuluan dan memberikan semacam ringkasan perkembangan

1) Karangan ini adalah teks ceramah yang saya berikan pada tanggal 7 April 1982 di Bandung, jadi sudah agak kuno. Maka publikasinya sekarang mempunyai beberapa kekurangan. Selain beberapa kelemahan dalam analisis sendiri, perkembangan kebijaksanaan Paus Johannes Paulus II (relevan bagi bagian II karangan ini) dan, terutama, literatur tentang *Laborem Exercens*, tidak diperhatikan sama sekali. Akan tetapi, karena pendirian Paus Johannes Paulus II nampaknya melanjutkan garis yang sudah mulai nampak pada saat karangan ini ditulis, dan karena tentang Ensiklik *Laborem Exercens* belum banyak dipublikasikan dalam bahasa Indonesia (dan karena saya tidak akan mempunyai waktu dalam waktu singkat untuk membaharui analisis saya empat tahun lalu ini), terpaksa karangan inilah yang saya tawarkan kepada pembaca yang budiman.

ajaran sosial Gereja Katolik dari 1891-1981; saya berusaha untuk menunjuk pada beberapa segi yang menurut saya penting bagi kita sekarang pun; bagi yang mengenal ajaran sosial Gereja bagian ini tidak memuat sesuatu yang perlu diperhatikan. Bagian kedua berusaha untuk menelusuri pola pendekatan teologis dan pastoral Paus Johannes Paulus II kita sekarang terhadap masalah-masalah sosial. Baru dalam bagian ketiga saya sampai ke masalah pokok karangan ini, ensiklik *Laborem Exercens*.

BAGIAN PERTAMA

AJARAN SOSIAL GEREJA KATOLIK SAMPAI PAUS JOHANNES PAULUS II

Pengantar

Ada satu kenyataan yang cukup menyolok, yaitu bahwa ajaran sosial Gereja baru mengudara pada akhir abad ke-19. Apa sebab Gereja berdiam diri selama 18 abad? Tidak mengherankan apabila lantas langsung dikemukakan pertanyaan sambungan: apa sebenarnya urusan Gereja dalam bidang penyusunan struktur masyarakat?

Dalam rangka prasarana terbatas ini saya tidak dapat memberikan suara uraian yang mendalam. Namun sebenarnya uraian mendalam itu tidak perlu. Jawaban atas pertanyaan itu terdiri dari dua bagian: pertama Gereja terlibat dalam mengusahakan tata susunan masyarakat yang adil bukan karena Gereja mempunyai tugas langsung di bidang politik, bukan seakan-akan Yesus seorang reformator, apalagi seorang revolusioner sosial, juga bukan seakan-akan kita mau mendatangkan firdaus ke dunia. Melainkan, dan itu bagian ke-2 karena inti perutusan Yesus di dunia adalah belas kasihNya terhadap manusia. Inti kabar gembira ialah bahwa Allah berbelas-kasih terhadap kita.²⁾ Hal itu kita saksikan dalam sikap Yesus terhadap setiap orang yang menderita. Dan oleh karena itu Yesus menegaskan bahwa kita semua pernah akan diadili bukan dari apakah kita ini sering berdoa, melainkan dari apakah kita menerima Yesus dengan baik — yaitu Yesus dalam setiap saudara yang lapar, tanpa pakaian, di penjara, asing.

Sejak itu keprihatinan terhadap sesama yang menderita tidak pernah hilang dalam Gereja. Sejak semula Gereja memperhatikan orang miskin,

2) Bandingkan ensiklik Johannes Paulus II "*Dives in Misericordia*" tanggal 3 November 1980 yang amat bagus itu.

para yatim piatu dan para janda, orang-orang di penjara, para pelacur dsb. Itulah, dan hanya itulah dasar keterlibatan Gereja dalam bidang sosial, sampai hari ini. Belas kasihan terhadap siapa saja yang menderita (bdk. "Dives in Misericordia", Joh. Paul II).

Tetapi mengapa ajaran sosial Gereja lalu muncul begitu lambat? Jawabannya ialah karena revolusi industri yang mulai dalam abad ke-18 menghadapkan Gereja dengan masalah-masalah yang baru sama sekali. Masalah-masalah baru itulah yang ditanggapi dengan ajarannya. Pendekatan Gereja terhadap penderitaan dalam 18 abad pertama dapat kita sebut karitatif. Artinya, adanya penderitaan dianggap kenyataan yang tidak dapat diubah, tetapi kita dapat mengurangi dengan membantu orang yang menderita. Revolusi industri dan gaya produksi kapitalis menimbulkan bentuk penderitaan yang baru: penderitaan yang jelas-jelas disebabkan oleh manusia, bukan oleh bencana alam atau kemiskinan tradisional. Kapitalisme memandang tenaga kerja buruh sebagai faktor produksi saja yang diperlukan menurut hukum pasar bebas, tepatnya menurut hukum permintaan dan tawaran. Maka buruh jatuh ke dalam belenggu kemiskinan dan ketergantungan yang menghina martabat mereka sebagai manusia dan membawa penderitaan yang amat besar.

Berhadapan dengan situasi itu, berhadapan pula dengan sosialisme, khususnya sosialisme Karl Marx, Gereja mulai menyadari bahwa obat untuk situasi itu bukanlah derma dan bantuan karitatif lain, melainkan perombakan struktur hubungan antara kapital dan kerja yang tidak adil itu. Masalahnya bukan lagi bagaimana menimbulkan rasa belas kasihan para majikan, melainkan tuntutan agar kaum buruh memperoleh keadilan. Kemiskinan bukan lagi sesuatu yang harus diterima sebagaimana kita menerima bencana alam melainkan merupakan akibat struktur masyarakat yang diciptakan manusia sendiri dan yang dapat diubah.

Hasil kesadaran itu adalah ajaran sosial Gereja. Jadi ajaran sosial Gereja adalah jawaban baru atas masalah yang baru pula, walaupun keluar dari keprihatinan yang lama yaitu: "masalah sosial", masalah kaum buruh industri modern.

Berikut ini saya akan memberikan tinjauan pendek tentang isi pokok ensiklik-ensiklik sosial.³⁾ Dalam hal ini saya akan melewatkan saja beberapa pertanyaan yang sebenarnya penting seperti misalnya, dari mana Gereja memperoleh pengetahuan yang mendasari ajarannya. Atau pertanyaan sejauh mana kita orang Katolik terikat oleh ajaran sosial itu.

3) Seluruh uraian ini berdasarkan buku karangan Oswald von Nell-Breuning: *Soziallehre der Kirche, Erläuterungen der lehrämlichen Dokumente*, Wien: Europaverlag 1978; bdk. juga A. Heuken SJ: *Ajaran Sosial Gereja menghadapi masalah-masalah aktual*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka 1982.

1. "Rerum Novarum" karangan Paus Leo XIII, 1891

Ensiklik ini betul-betul merintis jalan. Dalam beberapa segi ajarannya belum memuaskan, kekhasan situasi baru belum seluruhnya ditangkap. Belum ada analisis masyarakat kapitalis. Belum ada ajaran tentang pekerjaan itu sendiri. Leo XIII menulis seakan-akan seluruh masyarakat terdiri dari umat Katolik, jadi problematika pluralisme agama dan ideologi belum masuk dalam horison Sri Paus di Roma Katolik. Pembelaan terhadap hak milik pribadi dan kritik terhadap sosialisme yang tajam bisa menimbulkan kesan seakan-akan Paus memihak para pemilik modal.

Namun kesan itu menipu. Tidak percuma Paus kemudian dituduh terkena sosialisme oleh golongan Katolik kanan. Apa yang dikutuk sebagai sosialisme pada zaman sekarang akan kita sebut komunisme, dan memang pantas dikutuk. Dengan tegas Paus mengutuk liberalisme individualis. Amat pentinglah penolakan penentuan upah menurut hukum pasar no. 33 ss.). Pemogokan dinilai sebagai sesuatu yang jelek — tetapi dalam keadaan darurat di mana tidak ada jalan lain, boleh; hak mogok sebagai senjata terakhir kaum buruh dengan demikian sejak semula diakui oleh Gereja (no. 31).

Ada dua ajaran yang amat fundamental dan yang secara definitif menyelesaikan masalah yang dipertentangkan dalam kalangan Katolik sendiri. Pertama, melawan keyakinan dasar liberalisme Leo XIII tidak hanya membenarkan hak negara untuk mengadakan intervensi dalam bidang sosial ekonomis demi untuk melindungi pihak yang lemah, melainkan menganggap pemberian perlindungan itu sebagai kewajiban yang membebani negara. Yang kedua, Paus membenarkan hak kaum buruh untuk membentuk serikat-serikat guna membela diri (no. 38). Dengan memandang sepintas saja ke sekeliling kita kiranya jelas penegasan Paus bahwa buruh berhak membentuk serikat mereka sendiri sedikit pun tidak kehilangan aktualitasnya.

Masih ada satu hal yang penting. Dalam ensiklik itu Paus mengklaim hak Gereja untuk bersuara dalam bidang sosial, maka ensiklik itu sekaligus merupakan penolakan terhadap pendapat yang mau membatasi kesaksian Gereja pada apa yang disebut bidang "sakral".

2. "Quadragesimo Anno" karangan Paus Pius XI, 1931

Ensiklik yang memperingati 40 tahun *Rerum Novarum* ini memuat ajaran yang jauh lebih sistematis dan mendalam. Saya membatasi diri pada dua hal pokok dalam ensiklik itu.

Pertama, Paus membedakan antara fungsi individual dan fungsi sosial hak milik (no. 45 ss.). Fungsi individual tidak boleh menggagalkan fungsi sosial, yaitu bahwa semua harta benda materiil pertama-tama diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Maka hak negara untuk mengatur tata

susunan hak milik sesuai dengan kepentingan hidup sosial dan ekonomi masyarakat diakui (no. 40). Hak milik tidak hanya diciptakan oleh modal mati, melainkan juga oleh modal hidup, pekerjaan buruh (no. 54). Sehingga semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasilnya, bukan hanya si majikan. Dalam hubungan ini Paus untuk pertama kali mengusulkan pembentukan hak milik produktif dalam tangan kaum buruh (bdk. no. 59 s.).

Pokok kedua ialah apa yang oleh Prof. Nell-Breuning diterjemahkan dengan "perjuangan kelas yang telah disodot racunnya"⁴⁾: Berbeda dengan ideologi kesatuan yang tentu saja menguntungkan kaum pemilik, Paus tidak bertolak dari suatu kekeluargaan fiktif yang seakan-akan mempersatukan kaum pemilik modal dan pemilik tenaga kerja. Melainkan Paus bertolak dari fakta "masyarakat kapitalis yang berkelas", dari pertentangan antara kelas. Ia mengharapkan agar "perjuangan kelas-kelas lama-lama berkembang menjadi kerja sama" (no. 76). Hanya ada satu jalan ke masyarakat yang berdamai, yaitu "perjuangan antarkelas yang jujur, didukung oleh keadilan" (no. 114). Maksud Pius XI, kaum buruh berhak untuk berjuang demi hak-hak mereka; sistem produksi kapitalis memang berdasarkan pertentangan kepentingan kelas; tetapi perjuangan itu tidak boleh menjadi tujuan pada dirinya sendiri, tidak boleh mengarah kepada penghancuran pihak lawan, tetapi pada keadilan di mana semua pihak dapat berdamai. Nampaklah ajaran Santo Thomas Aquinas: syarat *pax* (perdamaian) adalah *iustitia* (keadilan). Adalah suatu ilusi berbahaya kalau perdamaian dalam masyarakat mau diusahakan tanpa mengusahakan keadilan lebih dahulu: ciptakan keadilan dulu, hal mana mengandaikan perjuangan, dan baru perdamaian kekeluargaan dapat dicapai.

3. "Mater et Magistra" karangan Paus Johannes XXIII, 1961

Dengan ensiklik *Mater et Magistra* ajaran sosial Gereja mulai menampilkan suatu wajah baru. Uraian yang sistematis teoretis dan berargumentasi atas dasar faham hukum kodrat disingkirkan oleh pendekatan yang lebih bersifat empiris sosiologis, dengan suatu motivasi yang lebih teologis dan pastoral. Paus, misalnya, tidak ragu-ragu untuk memberi pelbagai nasihat konkret kepada kaum petani, nasihat-nasihat mana oleh para ahli diterima dengan agak kritis.

Kecuali itu ensiklik ini dengan jelas mencerminkan suatu peluasan perspektif Gereja. Kalau *Rerum Novarum* dan *Quadragesimo Anno* seluruhnya bergerak dalam konteks masalah perburuhan masyarakat industri Eropa dan Amerika Utara, maka *Mater et Magistra* untuk pertama kali menyoalakan masalah perbedaan antara negara-negara maju yang menikmati

4) Nell-Breuning, op.cit. hlm. 60.

kesejahteraan dan negara-negara berpenduduk tinggi yang miskin. Horison menjadi seluas dunia kita ini. Nampaklah bahwa masalah sosial utama dalam bagian kedua abad ini adalah masalah negara-negara berkembang.

4. "Pacem in Terris", karangan Paus Johannes XXIII, 1963

Ensiklik *Pacem in Terris* sebenarnya bukan tentang masalah sosial, namun perlu kami sebut di sini. Pertama karena dalam ensiklik ini untuk pertama kali Gereja secara resmi mengambil oper dan memperjuangkan paham hak-hak asasi manusia. Karena kompleks antiliberalisme yang dibawa dari abad yang lalu, masalah hak-hak asasi manusia lama sekali di-diamkan dalam Gereja, *Pacem in Terris* dengan nyaring mengumandangkannya sebagai bagian integral gambaran manusia Gereja. Yang menarik bahwa Paus secara eksplisit menyebut piagam hak asasi manusia PBB 1948 (no. 143; itu pun suatu "tanda zaman": sebelumnya Gereja selalu enggan mengakui bahwa ia mengambil oper sebuah pola berpikir atau faham dari dunia luar; seakan-akan segala-galanya harus ditetaskannya sendiri; Johannes XXIII, dan Paus-paus sesudahnya, tidak lagi takut untuk mengambil oper sesuatu dari luar lingkungan Gereja; suatu kemajuan besar!). Sejak ensiklik itu tidak lagi ada kemungkinan bagi orang Katolik untuk menganggap masalah hak-hak asasi sebagai sesuatu yang boleh dianggap sepi.

5. "Gaudium et Spes". 1965

Gaudium et Spes, yaitu konstitusi pastoral Konsili Vatikan II tentang Gereja dalam dunia sekarang, perlu kita sebut di sini, bukan hanya karena ajarannya yang kaya, melainkan karena Konstitusi ini merumuskan suatu sikap baru Gereja terhadap dunia. Dalam ensiklik-ensiklik sebelumnya Gereja mendekati dunia sebagai guru (bdk. "*Mater et Magistra*", "Ibu dan Guru"). Konsili Vatikan II tidak mau mengkurui umat manusia lagi, melainkan mau memperlihatkan bagaimana ia memahami diri dalam hubungan dengan dunia; Konsili tidak mau menekan melainkan mengajak. Nada konsili itu mengubah pendekatan Gereja terhadap dunia secara mendalam.

Dari ajaran konstitusi yang kaya itu saya hanya memetik dua hal saja. Pertama tekanan bahwa manusialah yang menjadi dasar, sumber, pembawa dan tujuan semua lembaga sosial (no. 25). Pandangan ini akan menemukan ekspresi yang kuat dalam ensiklik "*laborem exercens*". Unsur kedua ialah suatu distingsi penting yang juga kembali dengan nyaring dalam sekian banyak ceramah dan khotbah Paus kita sekarang: distingsi antara tugas Gereja sebagai institusi dan tugas para anggota Gereja. Sebagai institusi Gereja secara resmi mengambil sikapnya melalui tindakan dan wejangan hirarki. Sedangkan para anggota Gereja tidak bicara atas nama Gereja, melainkan atas nama serta berdasarkan keahlian mereka sendiri, tetapi dalam

Roh Yesus dan semangat Gereja. Berhubungan dengan itu ditegaskan perbedaan tugas kaum awam dan para imam (sebagai anggota hirarki): mewujudkan tanggung jawab Gereja dalam dunia pertama-tama merupakan tugas kaum awam, sedangkan mereka boleh mengharapkan dari para imam "cahaya dan kekuatan rohani" (no. 43). Perbedaan tugas ini sekaligus mau mengikis habis sisa-sisa klerikalisme di mana segala tugas Gereja mau ditentukan oleh klerus (para imam dan uskup).

6. "Populorum Progressio", karangan Paus Paulus VI, 1967

Ensiklik yang menghebohkan ini karena begitu keras mengutuk kapitalisme internasional dan sekaligus diam tentang komunisme lebih memajukan lagi kesadaran Gereja akan tugasnya dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Ensiklik-ensklik pertama, *Rerum Novarum* dan *Quadragesimo Anno*, membatasi diri pada penguraian ajaran Gereja tentang bagaimana seharusnya masyarakat disusun. Jadi Gereja membatasi diri pada pengajaran paham yang tepat tentang bentuk masyarakat yang seharusnya.

Namun, di bawah pengaruh Marxisme Gereja pun semakin menyadari bahwa ketidakadilan sosial bukanlah akibat ketidaktahuan tentang keadilan semata-mata, melainkan berakar dalam struktur-struktur proses ekonomis, politis, sosial dan budaya. Tanpa perubahan struktur-struktur itu ketidakadilan tidak dapat dibongkar. Jadi untuk menghapus ketidakadilan tidak cukuplah Gereja memberi suatu ajaran saja: Gereja harus ikut membongkar struktur-struktur yang tidak adil itu.

Nah, dalam ensiklik "*Populorum Progressio*" Paus Paulus VI bicara tentang perlunya pembongkaran struktur-struktur yang tidak adil (no. 30-33), (dan oleh karena itu sejak itu Beliau oleh saya kanan dalam Gereja dituduh sebagai "kriptokomunis"): struktur-struktur yang tidak adil dalam tiap-tiap masyarakat, dan struktur-struktur tidak adil dalam hubungan internasional, khususnya dalam hubungan ekonomis antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang.⁵⁾

7. "Octogesima Adveniens" karangan Paus Paulus VI, 1971

Dokumen terakhir ingin saya singgung adalah surat Paus Paulus VI kepada Ketua Dewan Awam untuk memperingati 80 tahun ensiklik *Rerum Novarum*, "*Octogesima Adveniens*". Surat yang tidak memperlihatkan suatu sistematis tegas ini mengungkapkan sesuatu yang sesuai dengan garis pendekatan "Gaudium et Spes": Gereja memberi semangat tetapi tidak mau, bahkan tidak dapat menawarkan pemecahan-pemecahan konkret ter-

5) Tema ini muncul dengan tegas kembali dalam Instruksi Kongregasi tentang Ajaran Iman mengenai Kebebasan Kristiani dan Pembebasan, Roma tanggal 22 Maret 1986.

hadap masalah-masalah sosial. Untuk itu dibutuhkan keahlian "duniawi" yang tidak dimiliki Gereja sebagai Gereja. Maka dalam surat ini kekhasan peranan Gereja dalam pengaturan masyarakat yang adil semakin jelas.

Kekhasan peranan inilah yang menjadi salah satu tema utama Paus kita yang sekarang, maka sekarang saya akan membicarakan bagaimana kebijaksanaan Paus Johannes Paulus II terhadap masalah sosial.

BAGIAN KEDUA

PAUS JOHANNES PAULUS II DAN MASALAH SOSIAL

Pengantar

Pada permulaan sikap Paus Johannes Paulus II mengenai keterlibatan Gereja dalam masalah keadilan sosial membingungkan banyak orang. Di satu pihak Paus sering mengajukan tuntutan-tuntutan perubahan sosial yang keras, kadang-kadang revolusioner. Misalnya dalam pidato Beliau di depan sejuta petani Indian 1979 di Oaxaca, Mexico, di mana Paus menuntut pembagian tanah para landlord kepada para penggarap, atau pidatonya di hadapan para buruh tebu di Filipina 1981. Di lain pihak Paus nampaknya bersikap dingin terhadap teologi pembebasan Amerika Latin. Begitu pula berulang-ulang Beliau mengecam kaum rohaniwan dan rohaniwati yang memasuki bidang politik, seakan-akan mereka melepaskan kesaksian tentang Injil demi keterlibatan dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Akan tetapi, sementara ini garis besar sikap Paus kita ini menjadi semakin jelas, sampai dengan instruksi Kongregasi tentang Ajaran Iman tanggal 22 Maret 1986 tentang Kebebasan Kristiani dan Pembebasan.

Justru karena dampak Paus kita sekarang terhadap kesadaran diri Gereja, dan supaya ensiklik "Laborem Exercens" dapat kita lihat dalam kerangka yang tepat garis besar kebijaksanaan Beliau yang sebenarnya perlu kita cari. Dalam hal ini saya dibantu oleh sebuah karangan Prof. Ernst-Wolfgang Böckenförde (Profesor untuk Hukum Umum di Universitas Freiburg) yang sudah terbit pada bulan April 1980 tetapi yang analisisnya menurut hemat saya dibenarkan oleh perkembangan-perkembangan selanjutnya sampai sekarang. Analisis Böckenförde saya anggap betul-betul membantu untuk menemukan benang merah dalam sikap Sri Paus. Diperlihatkan bahwa sebenarnya Paus Johannes Paulus telah "mulai mengembangkan suatu program tentang tugas dan perutusan Gereja untuk dan dalam dunia yang berdasarkan suatu pandangan tentang hubungan antara Gereja dan politik yang menyeluruh dan beralaskan teologis, dengan suatu

kekhasan yang membedakan dari para pendahulunya”⁶⁾. Berikut ini saya akan menguraikan gagasan-gagasan pokok analisis Böckenförde.

Böckenförde menyebutkan 6 butir sebagai ciri khas sikap Paus Johannes Paulus II terhadap tugas Gereja dalam bidang sosial-ekonomis.

1. Perutusan Gereja berdasarkan kristologi

Pertama, Sri Paus mendasarkan tugas perutusan Gereja di dunia dalam rahasia Kristus: baru dalam Kristus manusia dapat mengerti siapa-kah dia. Dan oleh karena itu Kristuslah yang menjadi tolok ukur terhadap keterlibatan Gereja dalam dunia.

Pendekatan itu berbeda dari pendasaran tradisional dalam ajaran hukum kodrat. Paus ini mendasarkan tugas kita dalam dunia tegas-tegas pada iman kristiani sendiri. Dengan memandang pribadi Yesus Kristus yang historis perjuangan Gereja demi manusia dan hak-hak asasi manusia mendapat isi dan konkretisasi baru. Sekaligus Gereja tidak lagi dalam bahaya untuk tenggelam dalam dunia. Gereja tidak mengusahakan faham-faham dan sistem-sistem abstrak. Melainkan martabat manusia yang diukur pada kepenuhan kemanusiaan Yesus harus terlaksana bagi setiap orang masing-masing. Yesus Kristus adalah ukuran bagi martabat manusia.

2. Usaha Gereja bersifat bukan-politik — politik

Gereja sibuk dalam dunia bukan karena mempunyai tujuan-tujuan politis, karena mendukung sistem-sistem tertentu atau karena mau menjadi salah satu pihak dalam percaturan politik. Melainkan satu-satunya dasar bagi keterlibatan Gereja di bidang sosial-ekonomi-politik pun adalah Injil, pemakluman Kristus Sang Penebus yang sendiri bukan seorang politikus, revolusioner atau pemberontak. Atas dasar perutusan khas injili itu Gereja membela manusia dalam martabatnya, dalam kebebasannya, dalam tujuannya yang terakhir.

Namun karena pembelaan itu niscaya menyentuh struktur-struktur dalam masyarakat, perutusan Gereja itu secara hakiki mempunyai dimensi politik. Memang bukan dalam arti Gereja menjadi salah satu perebut pengaruh politik. Melainkan dalam arti bahwa usaha untuk mengembalikan manusia pada martabatnya mau tak mau akan mengubah masyarakat, dan dalam arti itu memang bersifat politik. Ada tiga titik berat:

(1) Gereja memperjuangkan **hak-hak asasi** dan **martabat manusia** yang justru dikembalikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Gereja menurut Sri Paus ”harus menyebutkan ketidakadilan dengan jelas ... Gere-

6) dalam *Stimmen der Zeit* 1980, hlm. 219, dan seterusnya; selanjutnya acuan ke karangan ini diberikan dalam teks dengan huruf B.

ja harus menyebut setiap diskriminasi, setiap paksaan terhadap manusia, terhadap tubuhnya, terhadap rohnya, terhadap suara hatinya atau keyakinannya!" (B 224).

(2) Sebagaimana "Kristus berdiri di fihak kaum miskin", begitu Gereja harus berfihak pada kaum miskin dan mereka yang menderita (B 225).

(3) Jalan kekerasan bertentangan dengan maklumat Kristus dan oleh karena itu harus ditolak.

3. Tugas Gereja sebagai jabatan kenabian

Tugas Gereja dalam masyarakat dilihat sebagai partisipasi dalam jabatan kenabian Kristus. Hal itu berulang-ulang ditegaskan Sri Paus. Gereja wajib mewartakan seluruh kebenaran tentang manusia: pembebasannya dari segala perbudakan pengangkatannya oleh Yesus Kristus, berhadapan dengan setiap kekuasaan, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan lain. Pewartaan itu konkret, tidak terbatas pada beberapa prinsip saja, sesuai dengan kebutuhan situasi tertentu itu.

Sebagai nabi, Gereja menyadari bahwa akan menderita penganiayaan demi Injil. Gereja tidak mempunyai solusi-solusi tertentu, tetapi dalam semangat Kristus Gereja tahu apa yang dituntut setiap situasi.

4. Perbedaan antara tugas imam dan awam

Di Puebla Sri Paus berseru kepada para imam Amerika Latin, "Biarlah kalian itu imam dan biarawan, bukan pemimpin sosial atau politik, atau fungsionaris salah satu kekuasaan ideologis" (B 228). Banyak yang mengartikan seruan itu sebagai signal bagi Gereja untuk mundur dari keterlibatan duniawi-politiknya. Namun pengartian itu berdasarkan suatu salah paham, yaitu penyamaan Gereja dengan imam-imam. Yang mau ditekankan Paus ialah tugas spesifik para imam dalam Gereja. Menurut Paus keterlibatan langsung di bidang sosial politik adalah tugas para awam. Sedangkan para imam dipanggil untuk menyaksikan serta mempermaklumkan kabar gembira Kristus secara eksplisit.

Apa yang dimaksud oleh Bapak Suci barangkali, dapat menjadi jelas dari apa yang dikatakan Beliau pada tanggal 27 Februari 1982 kepada para pimpinan Serikat Yesus di Roma; saya kutip sebagian: "... dapat dimengerti mengapa Gereja menganggap dukungan terhadap keadilan sebagai bagian hakiki penginjilannya ... Dalam bidang ini tidak semua mempunyai fungsi yang sama, dan yang menyangkut para anggota Serikat Yesus maka tidak boleh dilupakan bahwa keterlibatan demi keadilan yang perlu harus dijalankan sesuai dengan panggilan kalian sebagai biarawan dan imam. Sebagaimana telah saya katakan pada tanggal 2 Juli di Rio De Janeiro, pelayanan imam 'apabila imam mau tetap setia terhadap dirinya sendiri, teruta-

ma dan secara hakiki bersifat rohani. Itu mau saya tekankan secara khusus pada hari ini berhadapan pelbagai aliran yang mau menyekularisasikan pelayanan imam sehingga pelayanan itu hanya mendapat arti filantropis. Pelayananannya bukan pelayanan seorang dokter atau *social worker*, politikus atau pemimpin serikat buruh. Dalam situasi tertentu imam barangkali dapat mengambil oper tugas-tugas seperti itu, tetapi hanya sebagai wakil ... Imam harus memenuhi keputusan khusus bagi jiwa-jiwa, bagi hubungannya dengan Allah, dan bagi hubungan batin mereka antar-mereka ... Memang, apabila situasi menuntutnya, ia tidak akan menolak untuk memberi bantuan materiil, melalui karya-karya karitatif dan melalui pembelaan keadilan. Tetapi ... itulah pada akhirnya suatu pelayanan sekunder' ..." (bdk.Oss. Rom. 12.3.82/No. 11).⁷⁾

Saya kira, pandangan Sri Paus itu sudah jelas sekali walaupun penerapannya memerlukan kemampuan untuk merasakan gerakan Roh Allah. Dalam keadaan di mana tidak ada fihak lain, seorang imam pun wajib untuk menghadirkan Gereja dalam perjuangan demi pemberantasan ketidakadilan, dalam segala dimensi, tetapi sebenarnya itulah tugas kaum awam dan tugas utama para imam adalah secara eksplisit membantu manusia untuk menemukan Allah.

Saya merasa bahwa sebenarnya Paus kita sekarang sama sekali tidak mau mengurangi keterlibatan Gereja demi penegakan keadilan.⁸⁾ Melainkan yang menjadi keprihatinan Beliau ialah jangan sampai kaum rohaniwan dan rohaniwati terkena arus sekularisasi, menjadi malu akan status orang rohani, dengan iman yang menipis, sehingga usaha di bidang keadilan sebenarnya merupakan pelarian atau usaha mencari identitas yang lebih mudah diterima oleh lingkungan.

5. Pertobatan hati dan perubahan struktur-struktur

Keseimbangan pandangan Sri Paus kelihatan karena ia selalu berpegang pada keseluruhannya. Dalam pidato-pidatonya Beliau menuntut reform-reform dan perubahan-perubahan yang berani dan radikal, atas nama keadilan dan martabat manusia. Ia melihat adanya "dosa struktural" seperti inflasi, pengangguran, sistem-sistem keuangan dan kekuasaan yang tidak adil.

Namun sekaligus Beliau skeptis terhadap perubahan struktural yang tidak disertai perubahan hati. Beliau berkata, "Manusia hanya akan maju di jalan perubahan struktur-struktur kehidupan ekonomi yang mutlak perlu

7) dalam *Osservatore Romano* berbahasa Jerman, tgl. 12.3.1982.

8) Pendapat saya dari tahun 1982 ini saya anggap semakin dibenarkan oleh sikap dan tindakan-tindakan Paus Johannes II selanjutnya.

apabila benar-benar terjadi juga suatu perubahan mentalitas, kehendak dan hati" (B 230).

Jadi tidak benar bahwa Paus menganggap hal struktural tidak penting. Tetapi mengubah struktur-struktur saja tidak akan menghapus ketidakadilan — seperti juga perubahan hati tidak akan berhasil tanpa perubahan struktur.

Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa Sri Paus sama sekali tidak begitu saja menolak teologi pembebasan. Yang ditegaskannya hanyalah agar pembebasan yang berasal dari Kristus jangan sampai disamakan begitu saja dengan pembebasan ekonomis, sosial, politik. Pembebasan itu harus dilihat secara menyeluruh sebagai pembebasan dari segala perbudakan dan dosa, dan tentu saja pembebasan menyeluruh itu tidak dapat membiarkan struktur-struktur penindas tetap berdiri saja.⁹⁾

6. Universalitas kebenaran kristiani

Karena Sri Paus tidak lagi berargumentasi atas dasar teori hukum kodrat, melainkan atas dasar Injil, maka ajarannya merupakan tuntutan kepada orang kristiani dan bukan kepada orang-orang lain. Misalnya di hadapan PBB Sri Paus tidak mengklaim untuk mengetahui bagaimana seluruh dunia harus diatur. Melainkan ia mengajak agar kita berusaha bersama untuk menjamin perdamaian dan pengakuan hak-hak asasi manusia.

Penutup

Analisis posisi Paus Johannes Paulus II Prof. Böckenförde kiranya membantu untuk mendapat gambaran yang seimbang tentang apa yang menjadi keprihatinan Sri Paus. Kita menyaksikan suatu keterlibatan mendalam akan pemulihan manusia seutuhnya, yaitu manusia sebagaimana nampak dalam Yesus Kristus, dan dalam keutuhan itu dimensi keadilan merupakan dimensi yang mutlak.

Dengan demikian kita telah mempunyai tempat berpijak untuk menganalisis ensiklik terakhir Paus Johannes Paulus II, "Laborem Exercens", tentang pekerjaan manusia.

9) Ini pun dalam Instruksi tsb. di catatan 5 ditegaskan dengan kuat, bdk. terutama no. 76 s.d. 88.

BAGIAN KETIGA ENSIKLIK PAUS JOHANNES PAULUS II "LABOREM EXERCENS"

A. Pengantar

"*Laborem Exercens*" adalah ensiklik pertama tentang perburuan yang ditulis bukan dari jauh dan dari atas, melainkan oleh seorang yang pernah menjadi buruh sendiri. Johannes Paulus II bicara bukan hanya berdasarkan teori, melainkan dari pengalamannya sendiri. Bahasa ensiklik itu tidak hanya mencerminkan daya berpikir yang mendalam, melainkan suatu hati yang terlibat. Itulah kesan pertama yang kita peroleh apabila kita membaca ensiklik sepanjang 27 nomor itu.¹⁰⁾

Walaupun ensiklik itu menempatkan diri dalam tradisi ajaran sosial Gereja, namun sebagaimana dikatakan oleh Sri Paus sendiri, Beliau bermaksud untuk "lebih daripada sampai sekarang mengemukakan bahwa pekerjaan manusia adalah kunci dan bahkan kunci yang hakiki dalam seluruh masalah sosial" (no. 3). Tema utama ensiklik "*Laborem Exercens*" adalah manusia yang bekerja: manusia pekerja sebagai person, sebagai subyek pekerjaan, pekerjaan sebagai sesuatu yang hanya dapat dimengerti dari manusia yang melakukannya, prioritas pekerja sebagai manusia terhadap modal sebagai barang.

Ensiklik ini disusun dengan jelas dan jalan pikirannya amat terang. Begitu pula bahasanya dan pesannya muda ditangkap. Tidak dapat diragukan bahwa ensiklik itu akan mendapat suatu tempat utama dalam ajaran Gereja.

Berikut ini, pertama saya akan menerangkan susunan dan gagasan-gagasan pokok ensiklik menurut urutannya. Kemudian saya akan membicarakan 7 hal yang saya anggap merupakan gagasan-gagasan yang paling perlu diperhatikan. Akhirnya saya akan bertanya apa kiranya relevansi ensiklik ini bagi kita di Indonesia.

B. Susunan dan isi pokok ensiklik

Ensiklik terdiri dari lima bagian besar. Dalam **Pengantar** diterangkan, mengapa Sri Paus membicarakan pekerjaan. **Bagian II** memberi pandangan teologis dasar tentang arti pekerjaan bagi manusia. **Bagian III** membicarakan

10) Lihat *Ensiklik Laborem Exercens dari Paus Yohanes Paulus II Tentang Makna Kerja Manusia Pada Ulang tahun Kesembilan puluh Ensiklik Rerum Novarum*, diterjemahkan oleh Marcel Beding, Ende: Penerbit Nusa Indah 1984; akan tetapi kutipan-kutipan dalam karangan ini berupa terjemahan saya sendiri dari teks berbahasa Jerman Ensiklik ini sebagaimana dimuat dalam *Osservatore Romano*.

kan ciri khas organisasi pekerjaan dalam masyarakat industri modern dan di seluruh dunia sejauh terkena olehnya, yaitu konflik antara pekerjaan dan modal. Sebagai patokan dasar ditegaskan prioritas pekerjaan terhadap modal. Atas dasar itu **bagian IV** membicarakan hak-hak manusia pekerja. Dalam **bagian V** dan terakhir Bapak Suci mengemukakan unsur-unsur suatu spiritualitas pekerjaan. Dalam uraian berikut saya mengikuti jalannya ensiklik sendiri.

1. PENGANTAR

Bertolak dari peringatan Rerum Novarum yang terbit 90 tahun yang lalu Paus menunjuk pada perubahan-perubahan dalam proses pekerjaan industrial sejak itu. Kemudian ia menerangkan tugas tepat Gereja dalam permasalahan sosial.

2. PEKERJAAN DAN MANUSIA

Bagian kedua memberi uraian yang mendalam tentang arti pekerjaan bagi manusia dan tentang bagaimana hakikat pekerjaan itu harus dilihat. Titik tolak adalah pengertian imani kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut citra-Nya dan ditugaskan untuk menaklukkan seluruh bumi. Penguasaan itulah dasar teologis terdalam martabat dan makna pekerjaan bagi manusia.

Kemudian Paus membedakan antara pekerjaan dalam arti obyektif dan dalam arti subyektif. Segi obyektif pekerjaan adalah keseluruhan sarana yang dipergunakan manusia dalam pekerjaannya, termasuk apa yang biasa kita sebut teknik. Paus menegaskan bahwa teknik itu seharusnya menjadi sekutu manusia, tetapi dapat juga menjadi lawannya. Pekerjaan dalam arti subjektif terwujud dalam manusia sebagai subyek pekerjaan. Sebagai citra Allah manusia adalah person yang bisa bertindak secara teratur dan sanggup untuk merealisasikan diri. Sebagai itu ialah subyek, pelaksana pekerjaan. Dalam pekerjaan manusialah yang harus berkuasa dan bukan teknik: Pekerjaan itu bagi manusia dan bukan manusia bagi pekerjaan. Paus menegaskan primat manusia sebagai subyek terhadap teknik, pekerjaan adalah arti subyektif terhadap pekerjaan dalam arti obyektif.

Apabila primat itu tidak diperhatikan, maka aturan yang sejak penciptaan ditentukan oleh Allah diputar balik. Itulah yang terjadi apabila pekerjaan dianggap sebagai barang dagangan yang dijual oleh si buruh kepada si majikan yang sekaligus memiliki seluruh alat produksi. Pemutarbalikan itu disebut kapitalisme. "Kapitalisme primitif" itu terulang "di mana saja manusia dalam salah satu bentuk disamakan dengan keseluruhan alat-alat produksi dan dengan demikian diperlakukan sebagai sarana" (no. 7). Manusia lantas tidak lagi sebagaimana seharusnya merupakan tujuan seluruh proses produksi.

Terhadap "penghinaan manusia sebagai subyek pekerjaan berhadapan dengan penghisapan luar biasa" buruh sudah muncul suatu "prahara solidaritas" (no. 8). Paus melihat bahwa solidaritas antara kaum buruh itu telah menghasilkan perubahan-perubahan mendalam. "Solidaritas itu selalu harus hadir apabila penghinaan sosial subyek pekerjaan, penghisapan kaum buruh dan wilayah-wilayah kelaparan yang semakin meluas menuntutnya". Dengan kata lain: penghisapan terhadap kaum buruh telah membangkitkan solidaritas di antara mereka. Paus menuntut agar Gereja berdiri di fihak kaum buruh: Gereja menganggap pembelaan kaum buruh "sebagai perutusan dan pengabdian, sebagai batu ujian kesetiannya kepada Kristus untuk dengan demikian betul-betul menjadi 'Gereja kaum Miskin'" (no. 8). Jarang seorang Paus menegaskan dengan begitu jelas bahwa Gereja harus berfihak pada kaum miskin sebagai tanda kesetiannya terhadap Injil.

Bagian II ditutup dengan uraian bagus tentang bagaimana manusia merealisasikan diri melalui pekerjaan dan dengan demikian membangun hidup kekeluargaan, kesatuan bangsa dan kesatuan dalam sejarah. Nam-paklah bahwa pekerjaan adalah suatu tindakan manusia yang hakiki.

3. KONFLIK ANTARA PEKERJAAN DAN MODAL DALAM TAHAP SEJARAH SEKARANG

Dalam bagian ketiga Paus membicarakan masalah-masalah utama sekitar pekerjaan dalam masyarakat-masyarakat industri modern. Ciri khas hubungan kerja dalam tahap sejarah ini ialah perpisahan antara pekerjaan dan modal, antara pekerja dan pemilik modal atau majikan. Terpaksa si buruh menjual tenaga kerjanya kepada majikan. Dia itu memperlakukan buruh menurut prinsip laba yang sebanyak-banyaknya. Demi tujuan itu upah ditekan serendah-rendahnya, jaminan keamanan kerja dan kesejahteraan buruh dengan keluarganya dikesampingkan. Dua posisi ideologis yang saling berlawanan adalah liberalisme dan sosialisme.

Dalam situasi ini Sri Paus menegaskan sesuatu yang jelas-jelas merupakan inti ensiklik "*Laborem Exercens*": yaitu primat pekerjaan terhadap modal. Segala usaha untuk menomorsatukan kepentingan-kepentingan ekonomis ditolak. Begitu pula dapat kita tarik kesimpulan, bahwa usaha untuk menciptakan keselarasan atau keseimbangan antara kepentingan kaum buruh dengan kepentingan modal bertentangan dengan ajaran Paus Johannes Paulus II. Pekerjaan memiliki primat mutlak. Mengapa? Karena menurut Paus kekuatan utama dalam proses produksi adalah pekerjaan sedangkan modal hanyalah sebagai sarana (pekerjaan subyektif dan obyektif). Diutarakan bahwa hak milik justru terbentuk melalui pekerjaan dan bahwa tidak ada modal atau alat kerja kecuali sebagai hasil pekerjaan. Primat pekerjaan terhadap modal memperlihatkan primat manusia terhadap benda.

Menurut Paus pertentangan antara pekerjaan dan modal tidak terletak dalam kodrat produksi, melainkan merupakan akibat suatu ekonomisme materialistik yang memandang segala-galanya dari segi keuntungan ekonomis saja. Pelipatgandaan benda-benda material menjadi satu-satunya tujuan produksi, sedangkan manusia dilupakan. Paus menegaskan bahwa "kekeliruan itu tidak akan dapat diatasi secara radikal kecuali diadakan perubahan-perubahan yang sesuai di bidang teori dan di bidang praktis, ... atas dasar keyakinan tegas tentang primat ... pekerjaan manusia atas modal" (no. 13).

Kemudian Paus bicara tentang **hak milik pribadi**. Ditegaskan bahwa hak milik pribadi hanya dapat difahami dengan tepat atas dasar hak bersama semua pemakaian benda-benda penciptaan. Jadi benda-benda material pertama-tama diperuntukkan agar seluruh umat manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan hanya demi tujuan itu kemudian berkembang hak milik pribadi sebagai pengorganisasian sekunder terhadap penggunaan milik seluruh umat manusia itu. Hak milik atas alat-alat produksi diperoleh melalui pekerjaan dan demi pekerjaan Paus dapat membenarkan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, tetapi sosialisasi pun tidak terkecualikan. Pemindehan hak milik atas alat-alat produksi ke tangan negara jangan dianggap sama dengan sosialisasi yang sebenarnya. Dalam hubungan itu Paus membicarakan bentuk-bentuk bagaimana kaum buruh dapat mengambil oper tanggung jawab dalam proses produksi. Ia menyebut kemungkinan kaum buruh ikut memiliki alat-alat produksi, ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan ("*Mitbestimmung*"), diikutsertakan pada laba yang diperoleh, penciptaan saham untuk kaum buruh dan lain sebagainya.

Akhirnya Sri Paus menegaskan sesuatu yang dalam implikasinya sebenarnya cukup revolusioner. Karena primat pekerjaan terhadap modal merupakan tuntutan etika sosial, maka situasi kerja hendaknya bersifat sedemikian rupa hingga buruh bekerja "dalam kesadaran bahwa ia bekerja dalam bidangnya sendiri" (no. 15).

4. HAK-HAK MANUSIA PEKERJA

Sesudah mengutarakan hubungan-hubungan yang sebenarnya antara pelbagai faktor produksi, khususnya tentang primat pekerjaan terhadap modal, Sri Paus mengemukakan hak-hak manusia yang bekerja. Hak-hak itu harus dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan "hak-hak asasi manusia yang pengakuannya merupakan prasyarat bagi perdamaian dalam dunia sekarang" (no. 16).

Paus mengemukakan suatu distingsi yang penting. Ia membedakan antara "majikan langsung" dan "majikan tidak langsung" (no. 17). Dengan "majikan tidak langsung" dimaksud "pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga", "perjanjian pekerjaan kolektif dan prinsip-prinsip kelakuan yang me-

menentukan seluruh sistem sosio-ekonomis". Terutama di situ termasuk juga negara. Jadi apa yang dinamakan "majikan tidak langsung" adalah sama dengan apa yang sering kita sebut struktur-struktur ekonomis, sosial dan politik yang merupakan kerangka yang menentukan luas jangkauan kebijaksanaan para "majikan langsung".

"Majikan yang tidak langsung", struktur-struktur sosial, ekonomi dan politik itu, merupakan suatu sistem ketergantungan satu sama lain yang menurut Sri Paus mudah bisa mengakibatkan pelbagai bentuk penghisapan dan ketidakadilan. Dengan lain kata, di sini Sri Paus mengarahkan perhatian kita pada struktur-struktur masyarakat yang tidak adil. Struktur-struktur itu dapat menyebabkan "perealisisan hak-hak buruh ... hanya merupakan hasil sampingan sistem-sistem ekonomi yang kurang lebih secara eksklusif ditentukan dari segi laba yang sebesar-besarnya" (no. 17). Sebaliknya Paus menuntut bahwa suatu ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang menjunjung hak-hak obyektif buruh.

"Majikan tidak langsung" itu amat menentukan juga dalam hal penyediaan **tempat kerja**. Paus memandang masalah pengangguran sebagai masalah yang gawat, khususnya pengangguran kaum muda. Ia juga menyesalkan perbedaan antara negara kaya dan miskin. Menurut Paus seharusnya pekerjaan semakin memperoleh penghargaan yang lebih tinggi.

Kemudian dibicarakan hal upah kesejahteraan buruh. **Upah yang adil** dianggap sebagai masalah kunci etika sosial. Upah yang wajar adalah masalah keadilan dan berdasarkan tuntutan bahwa harta benda material pertama-tama harus tersedia bagi penggunaan semua. Upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk mendirikan keluarga, menyelenggarakan secara pantas dan menjamin masa depannya. Proses bekerja harus diorganisasikan sedemikian rupa hingga keperluan-keperluan person ditunjang. Paus juga memperhatikan kedudukan kaum ibu dan wanita pada umumnya. Ia membicarakan pelbagai unsur penyelenggaraan kesejahteraan buruh.

Lalu Paus amat menekankan hak buruh untuk **berserikat dengan bebas**, untuk diwakili dalam **serikat-serikat buruh** sejenis. Serikat-serikat buruh bertugas untuk berjuang, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak legitim kaum buruh berhadapan dengan para majikan. Serikat-serikat buruh itu mutlak perlu dalam kehidupan sosial. **Perjuangan kelas** bukan satu-satunya dasar serikat buruh, tetapi mereka ikut berjuang demi keadilan sosial, demi hak-hak buruh yang sah. Bukan untuk melawan siapa-siapa, melainkan demi tujuan yang adil. Mereka berada dalam *oposisi* bukan demi oposisi, melainkan demi keadilan sosial.

Serikat buruh hendaknya membatasi diri dengan mengingat situasi umum. Mereka tidak bertugas langsung dalam bidang politik. **Hak mogok** wajib di jamin, tetapi dipergunakan hanya sebagai sarana terakhir. (no. 20).

Paus secara khusus membicarakan martabat pekerjaan **pertanian**. Ia menyesalkan keadaan kaum petani kecil dan buruh tani di beberapa negara berkembang dan berpendapat bahwa dalam situasi semacam itu "perubahan-perubahan radikal amatlah mendesak" (no. 21). — **Manusia yang cacat** berhak atas pendidikan dan berhak untuk diikutsertakan sepenuhnya dalam proses kerja. Uraian tentang masalah buruh yang mencari pekerjaan di **luar negeri** menutup bagian ini.

5. UNSUR-UNSUR SUATU SPIRITUALITAS PEKERJAAN

Paus Johannes Paulus II memberi dua petunjuk untuk perkembangan suatu spiritualitas pekerjaan. Pertama, pekerjaan itu adalah suatu partisipasi manusia pada karya penciptaan Allah. Kedua, "dengan manusia menanggung kesusahan pekerjaan dalam persatuan dengan Tuhan yang ter-salib, ia ikut bersama Putera Allah mengerjakan penebusan umat manusia dengan caranya sendiri" (no. 27).

C. Gagasan-gagasan pokok ensiklik "*Laborem Exercens*"

Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa unsur dari ajaran "*Laborem Exercens*" yang saya anggap sebagai unsur pokok ataupun unsur amat aktual. Tidak semua unsur itu baru. Ada yang sudah sebelumnya dikemukakan. Namun semua masih tetap relevan.

1. TENTANG URUSAN GEREJA DALAM BIDANG PEKERJAAN

Hanya secara singkat ensiklik membicarakan wewenang Gereja dalam bidang sosial. Dikatakan bahwa di satu pihak tidak menjadi tugas Gereja untuk memberi analisis ilmiah terhadap dampak perubahan-perubahan sosial pada kehidupan manusia. Kita dapat menambah: itulah tugas para ahli. Tetapi Gereja bertugas untuk "selalu menunjuk pada martabat dan hak-hak manusia pekerja serta untuk mendakwa situasi-situasi yang melanggarnya" (no. 1). Jadi Gereja tidak hanya berhak, melainkan wajib untuk menentang ketidakadilan dalam proses-proses ekonomis. Bahkan Paus mengatakan bahwa dengan demikian Gereja ikut memberi arah kepada perubahan-perubahan itu sehingga betul-betul akan merupakan kemajuan bagi manusia. Jadi dalam arti ini Gereja wajib untuk berpolitik. Menarik diri ke sakristi tidak dibenarkan Sri Paus.

2. NILAI LUHUR PEKERJAAN MANUSIA

Unsur kedua yang amat berarti ialah penegasan nilai luhur pekerjaan manusia. Penegasan itu baik dari segi teologis maupun filosofis. Namun tekanan terletak pada tinjauan teologis. Dalam pekerjaannya manusia ikut melaksanakan perintah Sang Pencipta untuk menguasai dunia. Dalam mengerjakan alam manusia seakan-akan memperpanjang karya penciptaan

Allah. Jadi pekerjaan jangan dilihat sebagai sesuatu yang rendah, melainkan sebagai tanda martabat manusia. Maka dalam proses kerja segi subyektif, yaitu manusia yang bekerja, perlu secara mutlak menjadi tujuannya dan bukan segi obyektif, alat-alat dan teknik yang pakaiannya. Manusia tidak pernah boleh dianggap sarana saja, maka pekerjaan tidak boleh dilihat sebagai salah satu faktor saja dalam produksi. Manusia sendiri adalah tujuan proses pekerjaan dan seluruh bidang ekonomi. Itulah dasar normatif dan suatu struktur ekonomi dan sosial hanyalah dapat diterima apabila manusia sebagai subyek menjadi tujuannya dalam arti yang nyata.

3. PRIORITAS PEKERJAAN TERHADAP MODAL

Kalau manusia sebagai subjek menjadi tujuan proses produksi jelaslah bahwa pekerjaan memperoleh prioritas terhadap modal. Dalam kenyataan ajaran ini adalah sangat revolusioner, karena sama sekali bertentangan dengan teori dan praksis cara produksi kapitalis, juga dengan sosialisme komunis di mana majikan swasta hanya diganti dengan majikan negara saja tetapi penghisapan buruh tetap berjalan terus.

Dalam sistem kapitalis laba ekonomis dan dengan demikian keuntungan pihak pemilik modal merupakan produksi. Faham ini disapu bersih oleh ajaran Paus yang tegas-tegas memprioritas pekerjaan terhadap modal.

Prioritas itu juga mendapat dukungan oleh pertimbangan Paus mengenai hak milik pribadi, khususnya hak milik yang berupa alat-alat produksi. Menurut liberalisme hak milik pribadi itu sesuatu yang statis dan dimiliki si majikan. Si buruh hanya menyewakan tenaga kerjanya saja. Maka ia hanya berhak atas upahnya, tetapi baik alat-alat produksi yang dipergunakan dalam proses pekerjaannya, maupun barang-barang yang diproduksi tetap menjadi milik eksklusif majikan, entah swasta, entah negara.

Menurut Paus itu tidak benar, Menurut Paus dasar hak milik satu-satunya yang sah justru adalah pekerjaan. Jadi hasil produksi juga menjadi milik kaum buruh. Alat-alat produksi pun yang sudah diketemukan buruh di tempat ia bekerja berasal dari pekerjaan. Hak eksklusif si majikan atas alat-alat produksi dengan demikian tidak sah. Bukannya Sri Paus mau melarang hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Karena alternatifnya, nasionalisasi pun tidak mengubah apa-apa. Tetapi yang ditolak adalah bahwa hak milik pribadi atas alat-alat produksi itu memberi kepada majikan hak eksklusif atas hasil proses pekerjaan.

Maka yang sebenarnya diserang Sri Paus adalah perpisahan antara modal dan pekerjaan. Semestinya yang bekerja menguasai modal. Sri Paus, sesuai dengan prinsip yang diutarakan pada permulaan, tidak memberi usul praktis ekonomis bagaimana hal itu dapat tercapai. Yang ditekankan adalah tujuannya. Atau dengan kata lain, sistem pekerjaan upahan itu sendiri perlu dirombak. Demi itu Paus mendukung pelbagai usaha yang di pelbagai negara sedang diperjuangkan kaum buruh untuk mengubah keadaan

mereka sebagai penerima upah belaka: ikut memiliki perusahaan, barangkali melalui saham-saham; ikut menikmati persentase dari laba yang dihasilkannya; ikut dalam pimpinan perusahaan ("*Mitbestimmung*") dan lain-lain. Kita melihat bahwa ajaran Paus tentang hakikat pekerjaan dan khususnya tentang primat pekerjaan terhadap modal mesti mendorong ke arah penciptaan struktur-struktur ekonomis yang tidak lagi kapitalis, entah kapitalis swasta (Barat), entah kapitalis negara (komunis), yang mengatasi perpecahan antara modal dan pekerjaannya.

4. PERUBAHAN STRUKTUR

Dalam usaha untuk mengatasi sistem pekerjaan upahan sudah termuat bahwa tidak mungkin kita membatasi diri pada perbaikan sana sini. Yang perlu diubah adalah struktur proses produksi yang mau tak mau berdasarkan penghisapan tenaga kerja buruh dan oleh karena itu bertentangan dengan martabatnya sebagai manusia dan subyek proses kerja.

Betapa penting masalah struktur dalam mata Sri Paus itu kelihatan dari tekanan besar yang diberikan kepada apa yang dinamakan "majikan tidak langsung". Dengan istilah itu rupa-rupanya Paus mau di satu pihak tetap memakai peristilahan lama yang bicara tentang buruh dan majikan, di lain pihak ia mau menarik perhatian kita pada kenyataan bahwa kedudukan buruh tidak hanya, bahkan sering tidak terutama ditentukan oleh para majikan langsung, para pemilik perusahaan secara individual, melainkan oleh struktur-struktur ekonomi, sosial, politik dan budaya yang menentukan jalur-jalur komunikasi di segala bidang dalam suatu masyarakat dan sering merupakan penunjang utama penghisapan para pekerja.

Dalam hal ini Sri Paus secara khusus mengingatkan tanggung jawab negara, bertentangan dengan dogma klasik liberalisme di mana negara jangan campur tangan dalam proses ekonomi.

5. UPAH YANG ADIL

Yang dikatakan tentang upah yang adil tidaklah baru, namun tetap aktual karena masih jauh dari terlaksana. Yaitu bahwa upah itu harus mencukupi agar buruh bersama keluarga dapat hidup secara wajar, sejahtera dan terjamin untuk masa depan. Juga usaha-usaha lain untuk menjamin kesejahteraan kaum buruh seperti segala macam asuransi tetap perlu ditegaskan.

Dalam hubungan ini perlu kita perhatikan bahwa upah yang wajar dan jaminan kesejahteraan buruh oleh Paus dianggap sebagai tuntutan keadilan dan hak buruh. Jadi tidak tergantung iktikat baik majikan atau negara melainkan merupakan hak buruh yang kalau tidak diberikan merupakan perampasan. Dasar hak itu adalah fakta bahwa yang melalui pekerjaannya menciptakan hak milik adalah buruh, (kiranya Sri Paus tidak mau menge-

mukakan ajaran klasik Ricardo dan Marx bahwa pekerjaan adalah satu-satunya sumber nilai tukar; argumentasi ensiklik sudah cukup dengan mengakui bahwa pekerjaan adalah faktor penting dalam penciptaan nilai).

6. SERIKAT BURUH

Amatlah menyolok betapa besar tekanan ensiklik atas hak buruh untuk membentuk serikat-serikat yang mewakili kepentingannya. Masih juga ada kalangan Katolik yang anti serikat buruh. Mereka diajar oleh Paus bahwa hak untuk membentuk serikat buruh secara bebas termasuk hak fundamental buruh.

Menarik juga bahwa Paus tidak segan-segan menyinggung istilah "perjuangan kelas" yang oleh sementara fihak Katolik mau ditabukan. Memang, Paus amat menegaskan bahwa perjuangan itu jangan menjadi tujuan pada dirinya sendiri, bahwa yang dilawan bukan manusia melainkan ketidakadilan. Namun tanpa perjuangan tidak ada kemajuan dan perjuangan itu dengan sendirinya dialamatkan kepada majikan. Perdamaian hanya bisa tercipta melalui keadilan dan tidak sebaliknya.

Maka juga tidak mengherankan bahwa sekali lagi seorang Paus menegaskan hak buruh untuk mogok harus dijamin, tanpa melupakan untuk memperingatkan kaum buruh bahwa hak mereka itu hanya boleh dipergunakan sebagai sarana terakhir.

7. LANDREFORM

Butir terakhir yang mau saya petik dari kekayaan "*Laborem Exercens*" sebenarnya tidak akan mengagetkan kita apabila kita ingat akan pidato keras Sri Paus di Mexico dan di Filipina. Yaitu bahwa pemilikan tanah-tanah luas oleh segelintir orang yang bahkan tidak mengurusnya, berdampingan dengan massa rakyat yang memerlukan tanah adalah sesuatu yang amat tidak adil. Dan bahwa hal itu segera harus diubah. Paus tidak memakai kata landreform, tetapi dari uraiannya menjadi jelas bahwa itulah yang dimaksud. Suatu bukti lagi bahwa ajaran sosial Gereja memang tidak mengenal tabuisasi hak milik pribadi atas alat-alat produksi, termasuk tanah.

D. "*Laborem Exercens*" dan kita di Indonesia

Saya bukan ahli ekonomi atau sosiologi, maka saya juga tidak akan menarik kesimpulan-kesimpulan konkret dari uraian-uraian ensiklik yang, nota bene, justru membatasi diri pada pertimbangan-pertimbangan prinsipial. Tetapi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang timbul pada saya sesudah membaca ensiklik ini.

1. TUGAS GEREJA

Kalau Gereja di Amerika Latin diperingatkan oleh Sri Paus agar keterlibatan sosial jangan menggeser pemakluman Injil, maka di Indonesia kita melihat suatu Gereja yang hampir-hampir seluruhnya membatasi diri pada pengurusan umatnya sendiri dalam bidang religius. Berdasarkan ajaran Paus bahwa Gereja wajib untuk mendakwa keadaan yang tidak adil, timbullah pertanyaan: apakah kita ini tidak berat sebelah? Apakah kita tidak perlu lebih giat ikut mengusahakan penegakan keadilan yang nota bene termasuk Pancasila? Apakah kita sudah cukup mengadakan mawas diri akan tugas Gereja dalam bidang sosial serta akan kemungkinan-kemungkinan nyata yang terbuka dalam situasi Indonesia sekarang? Apakah semua kemungkinan yang sebenarnya ada sudah kita gunakan?

2. NILAI PEKERJAAN

Dengan membaca uraian bagus Sri Paus tentang keluhuran pekerjaan maka semakin menyolok betapa rendah pandangan tentang pekerjaan dalam masyarakat. Dan kita orang Katolik? Apakah kita berbeda dari mereka yang bersama kaum priyayi menganggap hidup yang baik itu hidup tanpa pekerjaan? Bagaimana kita memperlakukan pelayanan kita di rumah-rumah kita? Apakah kita pun termasuk mereka yang menikmati konsumsi tingkat tinggi, konsumsi impor tanpa usaha sendiri, konsumsi mumpung tanpa bekerja, tanpa merasa malu? Bukankah dunia kaum buruh asing sekali terhadap suasana dalam gereja-gereja dan paroki-paroki kita? Dan walaupun banyak umat kita termasuk rakyat kecil, bukankah kita memberi kesan seakan-akan kita ini malu kalau bukan bergaya upperclass? Bukankah suatu perubahan perspektif sangat dibutuhkan?

3. PRIORITAS PEKERJAAN TERHADAP MODAL

Betapa jauhnya tuntutan itu dari kenyataan dalam masyarakat. Buruh-buruh kita adalah orang tanpa hak, yang secara kasar dipergunakan menurut kepentingan proyek yang berkenan mempekerjakan mereka. Mereka tidak bisa apa-apa. Suatu gagasan bahwa mereka "ikut memiliki" perusahaan tempat mereka bekerja (padahal itu suatu paham khas Indonesia) sama sekali tidak bisa berkembang. Kebijaksanaan itu sering masih dibenarkan sebagai "ketenangan di pasar pekerjaan" yang diperlukan demi kepentingan penarikan modal asing yang lebih banyak.

Bahwa produksi itu demi buruh yang menghasilkan, bukankah itu sesuatu yang sama sekali asing dari mentalitas para pengusaha kita? Bukankah buruh-buruh kita sebenarnya tidak dianggap lebih daripada sarana belaka untuk membangun segala macam kepentingan golongan kaya?

4. PERUBAHAN STRUKTUR

Kebanyakan orang kita belum memahami apa yang oleh Paus Johannes Paulus dinamakan "majikan tidak langsung". Mereka mengira bahwa ketidakadilan dapat dihapus dengan pendekatan sana sini, dengan himbauan-himbauan moral, atau dengan menunjuk pada papan dengan lima sila Pancasila yang tergantung di rumah-rumah kita (dan lupa bahwa Pancasila justru perlu kita amalkan).

Tidak perlu kita memikirkan "perubahan struktur" secara dramatis dan romantis. Yang perlu dipertanyakan apakah tidak justru Pancasila, dengan dua silanya yang terakhir: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah menyediakan tempat berpijak normatif untuk mengubah situasi kaum buruh dari buruh upahan ke buruh yang lama-kelamaan dimasukkan ke dalam tanggung jawab dan "ikut memiliki"? Sekarang musyawarah tidak pernah dipakai untuk bersama-sama merencanakan perkembangan produksi, melainkan hanya untuk melunakkan tuntutan kaum buruh akan kenaikan upah.

5. UPAH YANG ADIL, KESEJAHTERAAN KAUM BURUH

Betapa tidak memuaskan keadaan perupahan kaum buruh — sarana utama untuk menciptakan keadilan dalam proses pekerjaan menurut Paus — serta betapa kosongnya usaha penjaminan kesejahteraan buruh tak perlu saya utarakan. Yang mau saya pertanyakan: bagaimana lembaga-lembaga Katolik memperlakukan pegawai-pegawai mereka sendiri? Apakah tahan uji ajaran kita sendiri? Ataupun malah kalah dengan pelbagai lembaga pemerintah?

6. SERIKAT BURUH

Dilihat secara operasional maka barangkali yang paling aktual bagi kita di Indonesia adalah tekanan Paus yang begitu tegas pada hak buruh untuk berserikat. Tidak dapat diragukan: menurut ajaran Gereja hak untuk membentuk Serikat buruh yang betul-betul mewakili kaum buruh, lebih tepat: di mana kaum buruh betul-betul merasa diwakili, adalah salah satu hak mereka yang paling asasi. Penggerogotan hak itu bertentangan dengan martabat mereka sebagai manusia, dan, begitu dapat kita tambah, dengan Pancasila yang memuat pengakuan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua.

Paus tidak mengatakan apa-apa tentang apakah serikat buruh itu hanya satu atau beberapa, apakah dibentuk atas dasar ideologi, partai, atau (seperti di Jerman Barat) keburuhan sendiri. Tetapi yang jelas bahwa mereka harus betul-betul mewakili kaum buruh.

Tanda perwakilan yang nyata menurut Paus adalah perjuangan mereka. Paus tidak menerima suatu perdamaian masyarakat atas pundak kaum buruh yang dihisap tenaga kerjanya. Menurut tradisi lama Katolik perdamaian mengandaikan keadilan, maka keadilan harus diciptakan terlebih dahulu, baru perdamaian menjadi mungkin. Perdamaian sebelum keadilan berarti mengabadikan ketidakadilan.

Di sini menjadi jelas bahwa kita orang Katolik dapat membantu agar prinsip kekeluargaan yang begitu ditekankan dalam masyarakat dan oleh Pemerintah kita difahami secara tepat. Prinsip itu justru tidak mematikan perjuangan kaum buruh melainkan harus mendasarinya. Kalau kita mematikan daya juang kaum buruh, kita ikut mengabadikan penghisapan yang begitu bertentangan dengan martabat mereka sebagai citra Allah. Kita sendiri pun kiranya perlu belajar berpikir baru. Ketakutan untuk menempatkan kaum buruh berhadapan dengan kaum majikan masih sangat meluas. Prinsip kekeluargaan disalahgunakan kalau dipakai untuk itu. Dalam suatu keluarga tidak ada tempat bagi penghisapan, dan kalau ayah menghisap anaknya, anak akan berjuang untuk membebaskan diri. Dan untuk kemudian berdamai dan bersatu kembali dengan ayah. Itulah ajaran Katolik tentang perjuangan demi keadilan. Justru dengan memperjuangkan keadilan kita menciptakan perdamaian satu keluarga dalam masyarakat.

7. LANDREFORM

Saya mau menutup karangan ini dengan menunjuk pada tuntutan Sri Paus akan landreform yang secara tidak langsung termuat dalam "Laborem Exercens". Tentu kita akan teringat akan puluhan juta petani dan buruh tani kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana kita dapat membantu mereka?